

PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, PENGAWASAN PREVENTIF DAN PENGAWASAN DETEKTIF TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ANGGARAN

Ayu Putri Pramithasari Haryoto

ayupph06@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine empirically the effect of performance budgeting. Preventive and detective supervision on effectiveness of budgeting control of Local Government Organization, Sidoarjo. The research was quantitative. While, the population was all department which were listed on Local Government Organization, Sidoarjo. Moreover, the data collection technique used purposive sampling with questionnaires as its instrument. In line with, there were 140 respondents as sample. However, from questionnaires which were given to respondents, only 135 were returned and properly to be analyzed. Additionally, the data analysis technique used multiple linear analysis with IBM SPSS 16. The research result concluded performance budgeting, preventive and detective supervision had positive effect on effectiveness of budgeting control. In other words, the departments which were listed on Local Government Organization had understood vision, mission, and strategic plan within implementation of supervision objectives achievement. Consequently, it had run well. Besides, based on performance budgeting which understandable, there was eagerness to create decentralization, democracy, transparency and accountability that provide effectiveness of budgeting control. Meanwhile, by having preventive and detective supervision it would minimize some mislead reaction and prevent some problems in order to have effectiveness of budgeting control. In brief, all hypotheses had been proven.

Keywords: performance budgeting, preventive and detective supervision, effectiveness of budgeting control

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang populasinya adalah seluruh Instansi yang terdaftar pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* sebanyak 140 sampel, tetapi kuesioner yang kembali dan layak diolah sebanyak 135 kuesioner. Analisis data menggunakan analisis linier berganda. Pengolahan data yang digunakan adalah IBM SPSS *versi* 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Dengan demikian, Instansi yang terdaftar dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah memahami visi, misi, dan rencana strategis dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan pada setiap Instansi yang terdaftar pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat berjalan seimbang. Hal ini ditunjukkan dari penganggaran berbasis kinerja yang dipahami dapat menciptakan semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas untuk tercapainya efektifitas pengendalian anggaran. Selain itu pengawasan preventif yang dipatuhi dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang menyimpang dan pengawasan detektif yang dilakukan dapat mencegah timbulnya suatu permasalahan sehingga dapat tercapai efektifitas pengendalian anggaran. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti kebenarannya

Kata kunci: anggaran kinerja, pengawasan preventif dan detektif, efektifitas pengendalian anggaran.

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah sedang mengupayakan pelaksanaan pengawasan anggaran yang lebih baik dari yang telah pemerintah jalankan sebelumnya yaitu dengan melakukan pembaharuan dan perubahan agar menciptakan kemampuan manajerial yang lebih efektif dan efisien untuk menjalankan sumber daya yang ada, termasuk penataan manajerial yang ada dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia juga semakin rumit. Sejumlah oknum di instansi pemerintah yang selayaknya menjadi panutan rakyat, banyak yang tersandung masalah hukum seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, penyalahgunaan dana proyek dan lain-lain. Seluruh kegiatan yang ada di dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja, kinerja instansi, maupun kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Pratama, 2014). Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Pengawasan pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek dalam akuntabilitas kinerja (Endrayani dan Darmawan, 2014). Penyusunan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai atau berdasarkan visi misi yang telah ada pada suatu instansi.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektivitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran (Mardiasmo, 2004). Dalam pengawasan menurut sifatnya dibagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif. pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan (Baswir, 2000).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran? (2) Apakah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran?; (3) Apakah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran?. Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. (2) Untuk menguji pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran; (3) Untuk menguji pengaruh pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Teory Agency*)

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (agen) berkewajiban untuk menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada para pemberi amanah (prinsipal) dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawabannya. Salah satu contoh adanya hubungan kerja antara prinsipal dan agent adalah anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Teori keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga timbul suatu konflik. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi berdasarkan asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh masyarakat (prinsipal) yang menggunakan pemerintah (agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat (Jensen dan Meckling, 1976).

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006). Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur atau indikator kinerja sebagai instrumen untuk mencapai sasaran program dan tujuan yang telah di rencanakan dan merupakan pengelolaan anggaran dan sistem penyusunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti juga berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002). Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja maka diperlukan suatu alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja, selain itu juga diperlukan sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur sehingga dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Pengawasan

Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ulum (2009), pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Secara umum tujuan pengawasan yaitu untuk menjamin agar pemerintahan daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membentuk aparaturnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif meliputi desain formulir, standar, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), kata-kata sandi, dokumentasi, konsistensi operasi. pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan (Widjaja, 2002). Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

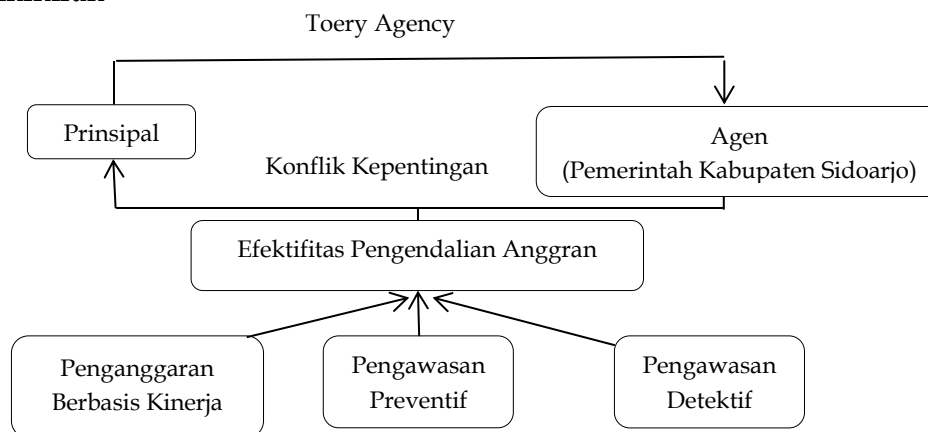
Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan (Baswir, 2000). Pengawasan detektif dilakukan setelahdilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan detektif harus menunjukkan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan. Contoh dari pengawasan detektif yaitu suatu daftar dari cek pembayaran dari mereka yang bekerja. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan itu timbul.

Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Baswir, 2000). Pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan (Baswir, 2000). Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Efektivitas pengendalian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan (Mardiasmo, 2004)

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Penganggaran berbasis kinerja mendorong partisipasi dari pemerintah sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum. Proses penyusunan anggaran dalam berbasis kinerja dimulai dari satuan kerja yang ada di pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK SKPD).

Lebih lanjut Mardiasmo (2004:31) menjelaskan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana terperinci atas pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskara (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian Anggaran

Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan preventif dilakukan pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan daerah yang akan membebankan dan merugikan daerah lebih besar. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) dengan hasil menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Baswir (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Pengawasan detektif sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengawasan detektif antara lain Baskara (2017) meneliti pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kota Dumai. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan detektif dalam efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kota Dumai. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Fuadi (2013)	Variabel bebas adalah pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Sedangkan variabel terikatnya adalah efektifitas pengendalian anggaran	Semua variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran
2	Pratama (2014)	Variabel bebas adalah pengawasan preventif dan pengawasan detektif. sedangkan variabel terkaitnya adalah efektifitas pengendalian anggaran	Pengawasan Preventif tidak berpengaruh sedangkan pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran
3	Peuranda (2014)	Variabel bebas adalah pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Sedangkan variabel terikatnya adalah efektifitas pengendalian anggaran	Pengawasan Preventif tidak berpengaruh sedangkan pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran
4	Nugroho (2016)	Variabel bebas adalah penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional. Sedangkan variabel terikatnya adalah efektifitas pengendalian anggaran	Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif sedangkan Pengawasan Preventif tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran
5	Baskara (2017)	Variabel bebas adalah pengawasan preventif dan pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja. Sedangkan variabel terikatnya adalah efektifitas pengendalian anggaran	Semua variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan

kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian explanatory yang bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Dinas/Badan, Kabid/Kabag, Kasubid/Kasubbag/Kasubdis, staf bagian akuntansi/keuangan dan staf Inspektorat pengawasan OPD Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian yang dijadikan populasi yaitu OPD Kabupaten Sidoarjo yang meliputi Dinas, Badan, Satpol PP dan Inspektorat Daerah.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2016 bahwa jumlah OPD Kabupaten Sidoarjo adalah 18 Dinas, 6 Badan, 1 Satpol PP, 1 Inspektorat dan 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive sampling. *Purposive sampling* yaitu cara penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono, 2012). Sampel dapat dipilih dengan kriteria tertentu sampel dapat mendukung dalam penelitian ini. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah : (1) Memiliki masa kerja minimal satu tahun atau lebih; (2) Memiliki jabatan sebagai kepala Dinas/Badan, Kabid/Kabag, Kasubid/Kasubbag/Kasubdis, staf bagian akuntansi/keuangan dan staf Inspektorat pengawasan OPD di Kabupaten Sidoarjo; (3) Berdasarkan pertimbangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran dilingkungan OPD Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dari kriteria yang telah ditetapkan terdapat sampel dalam penelitian sebanyak 18 Dinas, 6 Badan, 1 Satpol PP, 1 Inspektorat dan 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden yang menjadi bagian dari sampel. Data primer tersebut berisi daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden secara langsung dan kuesioner diambil kembali oleh peneliti dengan waktu yang telah dijanjikan responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-Ragu (RR), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) (Sugiyono, 2017).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, dan pengawasan detektif.

Pertama, Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Kedua, Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam kegiatan pemerintahan terdapat dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal. Pengawasan Preventif dilakukan oleh atasan pada OPD, yaitu kepala kantor dan kepala dinas.

Ketiga, Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung-jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi, serta untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan

Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas pengendalian anggaran. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi, pengendalian anggaran yang efektif adalah yang dapat mencapai tujuan dari pengendalian anggaran tersebut. Pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberi suatu gambaran tentang demografi responden penelitian, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan masa kerja yang termasuk kedalam data demografi.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi *pearson*. Signifikansi Korelasi *pearson* yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak valid dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaan tersebut valid (Ghozali, 2016).

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Ghozali (2016:47), reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik apabila memiliki *Alpha Cronbach's* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji yang dipakai pada metode yang bertujuan untuk mengetahui kenormalan model regresi yaitu uji statistik non-parametik, *kolmogorov-smirnov* test serta grafik normal *probability plot of standarized residual* (Ghozali, 2016). Kriteria pada uji statistik non-parametik *kolmogorov smirnov* yaitu jika nilai signifikansi *kolmogorov smirnov* > 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi normal *kolmogorov smirnov* < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Sedangkan kriteria pada

grafik *probability plot of regression standardized residual* yaitu jika data yang menyebar pada garis diagonal atau mengikuti garis diagonal maka memenuhi asumsi normalitas, namun jika data tersebut tidak menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal maka dinyatakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas dapat terdeteksi ada atau tidaknya dalam model regresi dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP). Ukuran ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas manakah yang akan dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan yaitu nilai *tolerance* 0,10 sama dengan nilai VIF diatas 10. Jikalau nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 maka dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel yang terdapat dalam model regresi (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, hal ini juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Gozali, 2016:96). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$EPA = \alpha + \beta_1 PBK + \beta_2 PP + \beta_3 PD + e$$

Keterangan:

EPA : Efektivitas Pengendalian Anggaran

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja

PP : Pengawasan Preventif

PD : Pengawasan Detektif

e : *Standar Error*

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Adapun kriteria pengujian, apabila R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2) menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model tersebut dapat dikatakan layak. Apabila R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2) menunjukkan bahwa sumbangan atau

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan layak (Ghozali, 2016:97).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi yang dihasilkan baik (layak) (Ferdinand, 2006). Adapun kriteria pengujiannya, apabila nilai $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) sehingga tidak dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Apabila nilai $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (uji t) digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak maka kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian, H_a diterima jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. H_a ditolak jika nilai $\text{sig} > \alpha = 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, pengawasan detektif dan efektifitas pengendalian anggaran yang diterangkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
PBK	135	2	5	3,62	0,612
PP	135	3	5	4,11	0,415
PD	135	2	5	3,94	0,536
EPA	135	3	5	4,03	0,484
Valid N (listwise)	135				

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Untuk mengetahui hasil rata-rata tanggapan responden digunakan *interval class* yang bertujuan untuk menghitung nilai atau skor jawaban yang diisi oleh responden

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Tabel 3
Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Rata-rata

Nilai Interval	Kategori	Nilai
4,20 < PBK, PP, PD, EPA ≤ 5,00	Sangat Setuju	5
3,40 < PBK, PP, PD, EPA ≤ 4,20	Setuju	4
2,60 < PBK, PP, PD, EPA ≤ 3,40	Netral	3
1,80 < PBK, PP, PD, EPA ≤ 2,60	Tidak Setuju	2
1,00 < PBK, PP, PD, EPA ≤ 1,80	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Singarimbun, 2009

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 3,62 dan standart deviation 0,612 artinya, memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 2 atau dinyatakan tidak setuju, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan sangat setuju, dan rata-rata jawaban responden bernilai 4. dalam interval kelas termasuk dalam kategori $3,40 < \text{PBK} \leq 4,20$ yang menunjukkan responden memberi nilai "setuju" atas pernyataan tentang semua aspek dalam penganggaran berbasis kinerja.

Pengawasan Preventif (PP) menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 4,11 dan standart deviation 0,415. Artinya, pengawasan preventif memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 3 atau dinyatakan ragu-ragu, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan sangat setuju, dan rata-rata jawaban responden bernilai 3,75 yang termasuk dalam interval kelas kategori $3,40 < \text{PP} \leq 4,20$ atau dinyatakan "setuju" atas pernyataan tentang semua aspek dalam pengawasan preventif.

Pengawasan Detektif (PD) menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 3,94 dan standart deviation 0,536. artinya, pengawasan detektif memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 2 atau dinyatakan tidak setuju, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan setuju, rata-rata jawaban responden bernilai 3,94 yang termasuk interval kelas kategori $3,40 < \text{PD} \leq 4,20$ atau dinyatakan "setuju" atau pernyataan tentang semua aspek dalam pengawasan detektif.

Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA) menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 4,03 dan standart deviation 0,484. artinya, penganggaran berbasis kinerja memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 3 atau dinyatakan ragu-ragu, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan sangat setuju, dan rata-rata jawaban responden bernilai 4,03 yang termasuk dalam interval kelas kategori $3,40 < \text{EPA} \leq 4,20$ atau dinyatakan "setuju" atau pernyataan tentang semua aspek dalam efektifitas pengendalian anggaran.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. Berikut adalah hasil uji validitas:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Signifikan	keterangan
PBK1	0,000	Valid
PBK2	0,000	Valid
PBK3	0,000	Valid
PBK4	0,000	Valid
PBK5	0,000	Valid
PBK6	0,000	Valid
PP1	0,000	Valid
PP2	0,000	Valid
PP3	0,000	Valid
PP4	0,000	Valid
PP5	0,000	Valid
PP6	0,000	Valid
PP7	0,000	Valid
PD1	0,000	Valid
PD2	0,000	Valid
PD3	0,000	Valid
EPA1	0,000	Valid
EPA2	0,000	Valid
EPA3	0,000	Valid
EPA4	0,000	Valid

Variabel	Signifikan	keterangan
EPA5	0,000	Valid
EPA6	0,001	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian validitas yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan masing-masing variabel yang diajukan kepada responden menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung yang didapatkan lebih besar dari r tabel dengan tingkat signifikan < 0,05.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5. Berikut adalah hasil uji reliabilitas:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,748	Reliabel
Pengawasan Preventif	0,712	Reliabel
Pengawasan Detektif	0,710	Reliabel
Efektifitas Pengendalian Anggaran	0,720	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

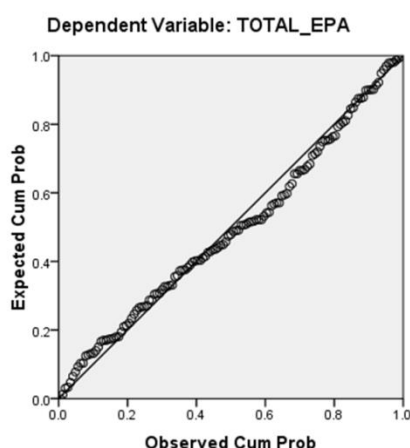
Berdasarkan Tabel 5 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai Cronbach's Alpha diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner yang diberikan kepada responden dinyatakan reliabel dan konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut adalah hasil uji normalitas yang menggunakan grafik normal *probability plot of regression standarized*:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2

Grafik normal *probability plot of regression standarized residual*

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan pada gambar *Normal P-P Plot of regression standart* diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,

maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas tidak hanya dilihat dari *Normal P-P Plot of regression standart* saja namun dapat dilihat dari perhitungan statistic dengan uji statistic non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikakasi diatas 0,05 maka data residual mendistribusikan dengan normal. sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikasi dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. hasil uji normalitas data dengan *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas residual dilihat dari nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,471 sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

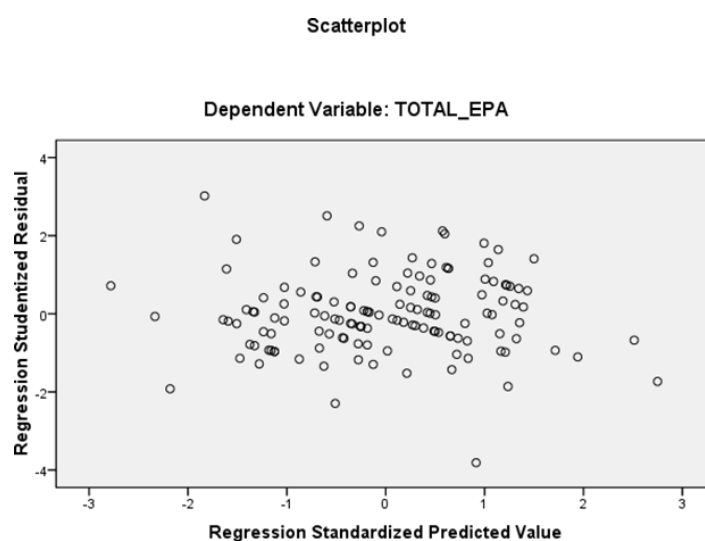
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PBK	0,941	1,063	Non Multikolinieritas
PP	0,863	1,159	Non Multikolinieritas
PD	0,854	1,171	Non Multikolinieritas

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengawasan Preventif (PP), dan Pengawasan Detektif (PD) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1, maka telah disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi kolerasi antara variabel dependen dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 3
Grafik Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan gambar *scatterplot* tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7. Berikut adalah hasil uji analisis regresi linier berganda:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients

Variabel	Beta	t	Keterangan
(Constant)	6,105	2,644	
PBK1 terhadap EPA	0,291	5,098	Berpengaruh
PP2 terhadap EPA	0,230	3,050	Berpengaruh
PD3 terhadap EPA	0,434	3,171	Berpengaruh

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 7, maka prediksi efektifitas pengendalian anggaran instansi yang terdaftar pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$EPA = 6,105 + 0,291PBK + 0,230PP + 0,434PD + e$$

Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel berdasarkan model regresi linier berganda di atas maka dapat dijelaskan bahwa seber 6,105. Konstanta sebesar 6,05 menunjukkan bahwa apabila Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengawasan Preventif (PP), dan Pengawasan Detektif (PD) memiliki nilai 0, maka efektifitas anggaran akan bernilai 6,105.

Nilai β_1 sebesar 0,291, menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) sebesar 0,291, bila Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) meningkat sejumlah satu satuan dengan anggapan variabel lain tetap, maka akan diikuti oleh Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA) sebesar 0,291 satuan.

Nilai β_2 sebesar 0,230, menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Pengawasan Preventif (PP) sebesar 0,230, bila Pengawasan Preventif (PP) meningkat sejumlah satu satuan dengan anggapan variabel lain tetap, maka akan diikuti oleh Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA) sebesar 0,230 satuan.

Nilai β_3 sebesar 0,434, menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Pengawasan Detektif (PD) sebesar 0,434, bila Pengawasan Detektif (PD) meningkat sejumlah satu satuan dengan anggapan variabel lain tetap, maka akan diikuti oleh Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA) sebesar 0,434 satuan.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi pada perhitungan statistic dapat diketahui bahwa besarnya nilai uji koefisien determinasi (R^2) antara Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengawasan Preventif (PP), dan Pengawasan Detektif (PD) terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA) ditunjukkan oleh nilai R yaitu sebesar 0,596 yang artinya bahwa semua variabel independen memiliki kontribusi sebesar 59,6% terhadap variabel dependen dan sisanya sebesar 40,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk menguji kelayakan model dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah mungkin terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang layak untuk digunakan. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari pengujian kelayakan model (uji F) dengan menggunakan SPSS versi 16. Signifikansi uji $F = 0,000$ yang artinya $< 0,050$, dapat disimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja (PBK), pengawasan preventif (PP) dan pengawasan detektif (PD) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap efektifitas pengendalian anggaran (EPA).

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8. Berikut adalah hasil uji hipotesis (uji t):

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Variabel	Sig.	T	SigValue	Keterangan
H ₁ PBK terhadap EPA	0,000	5,098	0,05	Berpengaruh
H ₂ PP terhadap EPA	0,003	3,050	0,05	Berpengaruh
H ₃ PD terhadap EPA	0,002	3,171	0,05	Berpengaruh

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji t di Tabel 8, maka dapat dijabarkan satu per satu sebagai berikut, yaitu hasil uji t menyatakan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA), tingkat signifikansi $0,000 < 0,050$. Artinya H_0 diterima yang berarti bahwa variabel Penganggaran Berbasis Kinerja berpengaruh akan variabel Efektifitas Pengendalian Anggaran.

Hasil uji t menyatakan bahwa Pengawasan Preventif (PP) berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA), dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,050$. Artinya H_0 diterima yang berarti bahwa variabel Pengawasan Preventif berpengaruh akan variabel Efektifitas Pengendalian Anggaran.

Hasil uji t menyatakan bahwa Pengawasan Detektif (PD) berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA), tingkat signifikansi $0,002 < 0,050$. Artinya H_0 diterima yang berarti bahwa variabel Pengawasan Detektif berpengaruh akan variabel Efektifitas Pengendalian Anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Berdasarkan hasil hipotesis dari uji hipotesis t bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran (H_1) diterima. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem penyusunan anggaran yang berkaitan dengan visi, misi dan rencana strategis penganggaran berbasis kinerja artinya yaitu semakin terbentuk juga semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penganggaran berbasis kinerja sehingga semakin tinggi tingkat efektifitas pengendalian anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyusunan anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi efektifitas pengendalian anggaran, sebaliknya semakin kurang baik penyusunan anggaran berbasis kinerja maka semakin rendah efektifitas pengendalian anggaran. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD Kabupaten Grobongan.

Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis t bahwa pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, sehingga (H_2) diterima. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin baik unit pengawasan anggaran menerapkan prosedur yang telah tertulis atau yang telah ditentukan maka sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat untuk mudah tercapai serta dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang menyimpang sehingga semakin tinggi tingkat efektifitas pengendalian anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan preventif maka semakin tinggi efektifitas pengendalian anggaran, sebaliknya semakin kurang baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan preventif maka semakin rendah efektifitas pengendalian anggaran. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fuadi (2013) menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukit tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari pengawasan preventif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Grobogan.

Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis t bahwa pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, sehingga (H_3) diterima. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin teliti unit pengawas dalam mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan sehingga semakin tinggi tingkat efektifitas pengendalian anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan detektif maka semakin tinggi efektifitas pengendalian anggaran, sebaliknya semakin kurang baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan detektif maka semakin rendah efektifitas pengendalian anggaran. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskara (2017) hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan detektif dalam efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD Kota Dumai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran yang dilakukan pada pegawai di seluruh instansi yang terdaftar pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditugaskan pada bidang pengawasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pegawai yang terdaftar dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditugaskan pada bidang pengawasan dengan responden sebanyak 140 orang yang diberikan kuesioner dengan menggunakan teknik *purposive sampling* pada masing-masing pegawai instansi yang telah terdaftar pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditugaskan pada bidang pengawasan, namun kuesioner yang kembali dan memenuhi persyaratan penelitian adalah sebanyak 135 kuesioner.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), berpengaruh positif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem penyusunan anggaran yang berkaitan dengan visi, misi dan rencana strategis penganggaran berbasis

kinerja artinya yaitu semakin terbentuk juga semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penganggaran berbasis kinerja sehingga semakin tinggi tingkat efektifitas pengendalian anggaran.

Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam variabel Pengawasan Preventif (PP), berpengaruh positif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik unit pengawasan anggaran menerapkan prosedur yang telah tertulis atau yang telah ditentukan maka sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat untuk mudah tercapai serta dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang menyimpang sehingga semakin tinggi tingkat efektifitas pengendalian anggaran.

Pada variabel Pengawasan Detektif (PD) berpengaruh positif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (EPA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin teliti unit pengawas dalam mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan sehingga semakin tinggi tingkat efektifitas pengendalian anggaran.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dikerjakan dengan usaha semaksimal mungkin, namun dalam penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode survey atau menggunakan data primer yang dilaksanakan dengan membagikan kuesioner (pertanyaan tertulis) tanpa dilengkapi dengan wawancara sehingga data yang dihasilkan bersifat subyektif dan responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan peneliti tidak dapat dianalisa secara luas. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda antara hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan keadaan yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada seluruh pegawai yang terdaftar dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditugaskan pada bagian pengawasan, maka saran yang bisa diambil adalah bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa mendatang sebaiknya peneliti tidak hanya menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan kuesioner saja, tetapi juga menambahkan dengan metode wawancara secara langsung, agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana hasil jawaban para responden bila dilakukan wawancara secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, B.Y. 2017. Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa (4)1*. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Baswir, R. 2000. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Endrayani, A, dan Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Singaraja). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Balai Pustaka. Jakarta.

- Fuadi, A. 2013. Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Padang.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Jensen dan Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Sructure, *Journal of Pnancial and Economics*. 3:305-360.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, L.S. 2016 Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobongan). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Peuranda, J.H 2014. Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa 1 (2)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Riau.
- Pratama, D. 2014. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Erektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pahlawan). *Jurnal Online Mahasiswa 1(2)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. Riau.
- Singarimbun, M. 2009. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Askara. Jakarta.
- Widjaja, G. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaaan Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.